

Gejolak politik saat pelaksanaan pemilu 1997 pada akhir pemerintahan orde baru

Hendra Aldi Perdana

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang 65145, hendraperdana1999@gmail.com,

Abstract

Elections are part of the democracy of a country that is central in the process of forming a government. The 1997 election was full of fraud aimed at perpetuating the power of the New Order, therefore waves of protests emerged in various regions. The wave of protests arose as a result of a crisis of people's trust in the New Order government which was considered to have made the Golkar Party its political tool. Starting from this, riots in various regions continued during the 1997 General Election.

Keywords

1997 Election, New Order, Crisis of Trust

Abstrak

Pemilu merupakan bagian demokrasi sebuah negara yang bersifat sentral dalam sebuah proses pembentukan pemerintahan. Pada pemilu 1997 sarat akan kecurangan yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru, oleh sebab itu gelombang protes bermunculan diberbagai daerah. Gelombang protes tersebut muncul akibat krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap menjadikan Partai Golkar sebagai alat politiknya, berawal dari hal tersebut maka kerusuhan diberbagai daerah terus terjadi saat Pemilu 1997 berlangsung.

Kata kunci

Pemilu 1997, Orde Baru, Krisis Kepercayaan

Pendahuluan

Orde Baru yang lahir pada 1966 menjadi warna baru sekaligus harapan yang telah ditunggu oleh banyak rakyat Indonesia. Kondisi negara yang tidak stabil pada era Orde Lama segera diatasi saat berlakunya Orde Baru dibawah kekuasaan Soeharto, kondisi politik menjadi hal pertama yang dibenahi disusul oleh ekonomi dan beberapa aspek penunjang lainnya. Kekuasaan yang dipegang penuh oleh Presiden Soeharto berimbas pada berbagai kebijakan pemerintah yang berhasil menciptakan kondisi negara yang stabil. Mulai dari penyederhanaan partai politik, keamanan, kebijakan ekonomi serta fungsi lembaga negara berjalan sesuai dengan kehendak Soeharto. Peran pemerintah sangat dominan sehingga suara dan keinginan rakyat seolah menjadi hal yang tabu pada massa tersebut (Hisyam, 2003:56).

Peran rakyat yang terbatas membuat pemerintah banyak melakukan berbagai penyimpangan, hal tersebut sangat terasa saat masa akhir dari Orde baru. Praktik KKN terasa mulai dari satuan unit pemerintah terkecil hingga ke pusat, ditambah dengan krisis moneter yang terjadi pada 1997 membuat pemerintah mendapat kritikan yang tajam dari rakyat. Keadaan negara yang tak stabil pada awal masa

krisis serta berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memperhatikan kondisi rakyat membuat krisis kepercayaan kepada pemerintah semakin terasa kuat. Pemilu yang diharapkan menjadi solusi bagi jalannya pemerintahan yang sesuai dengan demokrasi hanya dianggap formalitas oleh rakyat. Hal tersebut terjadi lantaran Golkar terlalu dominan dalam panggung politik dan kehadirannya sangat erat dengan kepentingan pemerintah yang berkuasa (Azwar, 2008:28).

Pemilu 1997 merupakan pelaksanaan pemilu ke-6 pada masa pemerintahan Orde Baru dan pemilu ke-tujuh semenjak Negara Indonesia berdiri. Namun yang menarik dari Pemilu 1997 adalah pemilu terakhir pada pemerintahan Soeharto yang sekaligus disambut banyak gelombang protes dan kerusuhan diberbagai daerah. Upaya protes terhadap pemerintahan santer berhembus kala itu, sebab Orde Baru tengah berada dalam titik jenuhnya lantaran rasa percaya rakyat yang semakin kecil ditambah keadaan negara yang kurang stabil serta tidak berjalannya pemilu yang demokratis. Dengan kondisi tersebut tidak heran apabila permasalahan kecil yang sudah biasa terjadi seperti rekayasa hasil penghitungan suara menjadi sebuah hal panas yang dapat memicu konflik (Syamsudin, 1999).

Kehadiran partai Golkar dalam pemilu sudah layaknya mesin politik dari pemerintahan Orde Baru sebab dengan cara apapun partai ini harus menang sehingga dapat melanggengkan pihak penguasa. Kemenangan Partai Golkar sendiri menjadi tanggung jawab aparaturnegara dan penguasa ditingkat daerah dengan jaminan jabatannya, dalam pemilu sendiri Partai Golkar terus mengulang materi kampanye tentang keberhasilan pembangunan dan banyaknya prestasi pemerintah dibawah kekuasaan Soeharto yang semuanya bersifat semu. Salah satu strategi Golkar untuk memenangkan pemilu adalah dengan menghancurkan pesaingnya, dalam hal ini partai PDI menjadi korban yang harus merasakan dualisme kepemimpinan yang berujung pada merosotnya perolehan suara (Syamsudin, 1999)..

Hasil dan Pembahasan

Jalannya Pemilu pada 1997

Proses pemungutan pada pemilu kali ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Peserta pada pemilu ini adalah Golkar, PPP dan PDI, protes yang mulai kencang berhembus dalam masyarakat membuat PPP dan PDI semakin berani untuk menyuarakan pendapatnya guna mengkritik pemerintah yang berkuasa. Sumber utama yang disoroti dalam protes rakyat ini adalah maraknya praktik KKN dalam pemerintahan ditambah kentalnya peran militer di parlemen lewat ABRI. Sebenarnya pemerintah sudah berusaha mengurangi gelombang protes tersebut dengan menerbitkan UU NO. 5/1995 yang isinya adalah mengurangi kursi ABRI di Parlemen, namun langkah tersebut tidak mampu meredam berbagai protes yang terlanjur meluas dikalangan masyarakat. Sebab pada pelaksanaan di lapangan pemerintah masih melakukan berbagai upaya untuk memenangkan Partai Golkar dalam proses pemungutan suara. Hal tersebut tentunya beralasan karena pada Pemilu 1992 Golkar dan PDI mempunyai perbedaan perolehan suara yang tidak terlampau jauh, oleh sebab itu kehadiran PDI dinilai dapat membahayakan posisi Golkar sebagai alat politik pemerintahan kala itu (Thoah, 2014)

Pemilu 1997 sudah diprediksi oleh sebagian kalangan tidak akan lebih demokratis jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, sebab saat sebelum berlangsungnya pemilu kondisi negara sedang tidak stabil mengakibatkan berbagai konflik rasial muncul dibanyak daerah akibat negara yang sedang mengalami krisis. Sehingga apabila dilihat lagi maka pemerintah dapat lebih mudah menekan aspirasi yang muncul dari rakyat akibat kondisi negara yang sedang kacau, selain itu pada proses kampanye sendiri sudah terlihat bahwa himpunan massa yang begitu besar dari Golkar diberi berbagai kemudahan dalam menjalankan strategi kampanye yang diusung. Keadaan

tersebut berbanding terbalik dengan perlakuan pemerintah terhadap partai PPP dan PDI yang mendapat berbagai tekanan dalam menjalankan strategi kampanye mereka (Azwar, 2008).

Posisi birokrasi yang kurang adil terus meluas hingga ke tingkat daerah yang dimana kemenangan partai Golkar merupakan tanggung jawab struktural dengan taruhan jabatan yang dimiliki oleh setiap kepala daerah. Sebagai contoh dari pernyataan tersebut ialah, saat masa kampanye berlangsung maka banyak atribut partai yang bukan Golkar akan dicopot dan dihilangkan begitu saja. Praktik tersebut sering terjadi diberbagai daerah sebagai langkah mendukung Golkar untuk dapat memobilisasi masyarakat umum kala itu, langkah tersebut tentu mendapat banyak tentangan utamanya dari pendukung PPP yang sering melakukan protes terhadap kantor birokrasi yang ada di wilayahnya. Strategi macam ini menjadikan banyak masyarakat sudah tidak menaruh kepercayaan terhadap pemilu yang akan digelar sebab dalam prosesnya Golkar sudah menjadi semacam mesin politik pemerintah dari banyak pemilu yang sudah berlangsung sebelumnya (Azwar, 2008:57).

Perolehan suara Golkar yang sangat tinggi pada pemilu 1997 tidak lepas dari konflik internal yang terjadi di kubu partai PDI. Konflik ini berawal dari perebutan kepemimpinan yang terjadi dalam partai tersebut, terpilihnya Megawati Soekarnoputri pada tahun 1993 menjadi awal terjadinya dualisme dalam kubu partai. Di lain sisi Soerjadi mengklaim dirinya sebagai pimpinan berdasar pada suara dari sebagian anggota pengikutnya, konflik internal dalam tubuh PDI terus meruncing hingga menjelang pada saat sebelum berlangsungnya pemilu. Pada 1996 Soerjadi yang mendapat dukungan pemerintah berhasil menduduki jabatan sebagai ketua, megawati yang tersingkir bersama pengikutnya berusaha untuk membuat partai baru (PDI-P) dan mendaftarkan diri pada Pemilu 1997. Namun pendaftaran tersebut ditolak dan kehadiran PDI-P dianggap sebagai partai ilegal, lewat situasi tersebut maka banyak simpatisan dari kubu PDI-P yang akhirnya mendukung PPP yang akhirnya dikenal sebagai gerakan "Mega-Bintang". Konflik internal ini terbukti ampuh untuk kembali menaikkan suara Golkar pada Pemilu 1997 sehingga menjadi pemenang dengan presentase perolehan suara yang mutlak(Denny, 2006).

Hasil dari pemilu sendiri menempatkan Golkar di urutan pertama dengan perolehan 74,51 persen suara, diikuti PPP dengan 22,43 persen suara dan terakhir ditempati oleh PDI yang hanya memperoleh 3,06 persen suara. Pada pemilu yang dihelat 29 Mei 1997 ini Golkar mendapat kemenangan mutlak yang disusul dengan gelombang protes dan kerusuhan di berbagai daerah sebab kemenangan Golkar kali ini dinilai sarat akan kecurangan. Hasil pemilu pada tahun 1997 tentu menjadi pukulan bagi PDI sebab pada pemilu sebelumnya tepatnya 1992 hanya partai ini yang dapat menjadi perbandingan dari kuatnya partai Golkar dengan berbagai macam strateginya (Friyanti, 2005).

Gejolak Politik dalam Pemilu 1997

Krisis kepercayaan adalah suatu keadaan suram yang membuat rasa yakin memudar atau menghilang seutuhnya, hilangnya rasa percaya biasanya berangkat dari rasa tidak puas ataupun sakit hati. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru diawali oleh maraknya KKN dalam pemerintahan yang ditambah pelaksanaan birokrasi yang semakin bobrok. Kenyataan tersebut semakin parah dengan pelaksanaan demokrasi yang tidak berjalan sebab Pemilu yang seharusnya menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat telah dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah yang berkuasa. Oleh sebab itu rasa tidak puas yang berkembang pada kalangan rakyat berimbas pada gejolak politik diberbagai daerah baik dalam masa kampanye ataupun saat pengumuman hasil pemilu (Dwianto, 2011).

Proses kampanye sebelum digelarnya Pemilu 1997 mulai menunjukkan situasi politik yang memanas, sebab diberbagai daerah terjadi banyak konflik yang berakar dari simpatisan partai yang berkompetisi. Kerusakan yang pertama terjadi di Pekalongan yang melibatkan pendukung PPP dengan pemerintah setempat, hal ini terjadi lantaran adanya perasaan tidak adil yang dirasakan pendukung PPP. Penertiban yang dilakukan terhadap atribut PPP diberbagai penjuru kota dilakukan lantaran pimpinan elite Golkar akan datang ke wilayah tersebut. Yang kedua ialah kerusakan di Jakarta, konflik ini berawal dari lewatnya simpatisan Golkar dihadapan para penonoton yakni masyarakat umum. Para simpatisan Golkar ini mencabut atribut dari partai PPP di setiap daerah yang mereka lewati, saat memasuki wilayah yang merupakan basis pendukung PPP maka konflik terjadi. Mereka tidak terima dan berusaha untuk menyerang pendukung Golkar yang sedang melakukan konvoi, kejadian tersebut berdampak pada pembakaran di sepanjang jalan yang dilalui pendukung Golkar sehingga banyak toko-toko yang juga menjadi sasaran pembakaran oleh massa. (Danial, 2009).

Kerusuhan yang terjadi di Banjarmasin merupakan kerusakan terbesar yang terjadi pada masa pemilu 1997, kejadian yang terjadi pada 23 Mei ini berawal dari kegiatan konvoi yang dilakukan oleh simpatisan Golkar dengan masyarakat setempat. Pada awalnya konvoi rombongan simpatisan Golkar ini melewati Masjid Annur (Banjarmasin) ketika warga sedang melakukan sholat jum'at namun mereka dianggap melakukan hal yang mengganggu seta tidak menghormati warga yang sedang beribadah. Setelah warga selesai melaksanakan sholat maka mereka berkumpul dan melakukan protes dengan cara menyerang rombongan konvoi tersebut, alhasil banyak masa dari daerah lain yang datang sehingga kerusakan semakin parah dan meluas. Akibat dari kerusakan tersebut massa terkumpul hingga jumlah 40.000-50.000 yang berakibat pada 113 orang terluka dan 123 meninggal sehingga kejadian ini merupakan kerusakan terbesar selama Pemilu 1997 (Syamsudin, 1999).

Kerusuhan diberbagai daerah tidak hanya terjadi saat masa kampanye namun juga kembali terjadi saat proses penghitungan suara. Salah satu kerusakan besar yang terjadi adalah di Sampang Madura, kerusakan meluas dari kota hingga ke penjuru desa yang berakibat pada proses pemungutan suara ulang. Latar belakang dari kerusakan tersebut adalah rasa tidak puas dari pendukung PPP yang mendominasi suara di wilayah Madura, sebab dari hasil penghitungan suara menempatkan Golkar di urutan pertama dengan selisih cukup jauh. Hal tersebut dinilai janggal karena pulau Madura merupakan basis besar bagi pendukung PPP, praktik kecurangan ini dilakukan oleh panitia pemilu diseluruh wilayah Sampang. Seperti halnya di TPS 09 yang memenangkan kandidat Golkar, warga yang curiga kemudian menuntut penghitungan ulang dan hasilnya kandidat PPP yang seharusnya di tempat pertama dengan 286 suara hanya berada di tempat kedua dengan 172 suara. Berawal dari satu TPS ini kemudian gelombang protes menyebar ke daerah lainnya (Hikam, 1999).

Praktik kecurangan yang dilakukan oleh panitia pemilu di Sampang sendiri ada berbagai macam seperti; tidak memberikan hak suara kepada sebagian besar santri disana, selain itu untuk menutup selisih jumlah suara maka petugas akan mencoblos sendiri surat suara dengan memilih Golkar, kecurangan selanjutnya adalah tidak memberikan form C-1 terhadap saksi dari PPP. Protes yang dilakukan oleh pendukung PPP berujung pada pembakaran kotak suara sehingga hasil pemungutan suara otomatis telah hilang, selain itu pimpinan PPP sampan dan simpatisannya menuntut pemungutan suara ulang. Mereka menuntut kurang lebih 1200 TPS di seluruh Pulau Madura melakukan Pemilu lagi disebabkan banyaknya kecurangan yang terjadi, selain tuntutan tersebut massa juga bergerak untuk melakukan pengrusakan berbagai sarana umum mulai dari

kantor Bank, pos Polisi, toko yang mayoritas milik keturunan Cina dan berakhir pada perusahaan kantor cabang Golkar di Sampang. Pemilu ulang dilaksanakan hari senin pekan depannya dengan dilengkapi pengawalan ekstra dari pihak keamanan dalam hal ini TNI diterjunkan langsung untukantisipasi kemungkinan kerusuhan lagi (Mul Khan, 2003).

Situasi yang tidak kondusif selama Pemilu 1997 terjadi lantaran hasil dari pesta demokrasi ini sah secara konstitusi namun terlihat cacat dimata rakyat. Hal tersebut sangat beralasan lantaran pemerintah menggunakan pemilu untuk melanggengkan kekuasaannya sehingga pada akhirnya rasa kecewa rakyat berubah menjadi hilangnya rasa percaya dan berbuntut kerusuhan diberbagai daerah. Hilangnya rasa percaya terhadap pemerintahan Orde Baru menjadi latar belakang meluasnya konflik saat pemilu berlangsung, kerusuhan tidak hanya terjadi pada daerah yang disebutkan sebelumnya namun sudah menyebar dalam skala nasional dan dalam waktu berdekatan. Daerah seperti Situbondo, Tasikmalaya dan Pontianak juga mengalami kerusuhan cukup besar, daerah-daerah terus bergolok lantaran menginginkan perubahan dalam pelaksanaan Pemilu serta rasa netral dari pemerintahan, sebab jalannya birokrasi sendiri telah membudayakan praktik KKN oleh sebab itu kehadiran pemilu dianggap sebagai solusi nyata dari permasalahan tersebut (Syamsudin, 1999).

Kesimpulan

Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir pada masa pemerintahan Soeharto, Pemilu ini sendiri bertujuan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Jalannya pemilu sendiri sarat akan kecurangan yang melibatkan Partai Golkar sebagai alat politik pemerintahan, rakyat yang sudah bosan akan keadaan tersebut berusaha melakukan gelombang protes dan berujung pada kerusuhan diberbagai daerah dalam waktu yang hampir berdekatan baik saat masa kampanye ataupun saat proses penghitungan suara. Gejala politik ini sendiri hadir sebagai wujud rasa tidak percaya oleh rakyat yang mengharapkan pemerintah dapat menjalankan pemilu yang demokratis, hal tersebut bertujuan untuk menggantikan kekuasaan birokrasi yang sarat akan praktik KKN pada saat itu. Gelombang protes yang melibatkan banyak massa berubah menjadi kerusuhan dengan skala besar sebab praktik kecurangan untuk memenangkan Partai Golkar dalam pemilu memang terjadi di seluruh daerah.

Daftar Rujukan

- Azwar, R.C. (2008). Partai Golkar di tiga era. Depok: Penerbit Universitas Indonesia
- Danial, A. (2009). Iklan Politik TV: modernisasi kampanye politik pasca orde baru. Yogyakarta: LKIS
- Denny, J.A. (2006). Catatan Politik. Yogyakarta: LKIS
- Dwianto, A. (2011). Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Elis, A. (2018). *Pengembangan media pembelajaran atlas sejarah berbasis ArcGIS 10.5 pada materi Kerajaan Mataram Islam untuk Kelas X SMA/SMK Sejarah Indonesia*. (Skripsi Jurusan Sejarah FIS UM). Tidak diterbitkan.
- Friyanti, F. (2005). Pelaksanaan pemilihan umum dalam sejarah nasional Indonesia. Skripsi tidak diterbitkan. FIS Universitas Negeri Semarang.
- Hikam, M.A. (1999). Islam, demokratisasi, dan pemberdayaan *civil society*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Hisyam, M. (2003). *Krisis masa kini dan orde baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mulkhan, A.M. (2003). *Moral politik santri: agama dan pembelaan kaum tertindas*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Syamsudin, H. (1999). *Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilu 1997*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Thoha, M. (2014). *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.